

# **KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI BELARUS TAHUN 2006-2014**

**Maliki Aji Prakoso**

**20120510044**

**Jurusan Hubungan Internasional**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2016**

## **Abstract**

This study aims to provide an overview of EU policies to the president of Belarus Alexander Lukashenko and officials. The author uses a theoretical framework that constructivist theory. Constructivism regards international politics as a field formed by the interaction of ideas and identities of the actors. By using the constructivist theory to analyze this paper, the EU policy on human rights violations in Belarus is to give emphasis to the president's political and Belarus officials to provide a deterrent effect against the human rights violations in Belarus. This policy is supported by the European Union's identity as an organization that upholds human rights in the world.

Keywords: EU, human rights, Belarus

## **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Uni kepada presiden Alexander Lukashenko dan pejabat Belarus. Penulis menggunakan kerangka teori yaitu teori Konstruktivisme. Konstruktivisme menganggap politik internasional sebagai bidang interaksi yang dibentuk oleh ide dan identitas para aktor.

Dengan menggunakan teori konstruktivis untuk menganalisa tulisan ini, kebijakan Uni Eropa terhadap pelanggaran HAM di Belarus adalah memberikan penekanan politik kepada presiden dan pejabat Belarus untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Belarus. Kebijakan ini didukung oleh identitas Uni Eropa sebagai organisasi yang menjunjung tinggi HAM di dunia.

Kata kunci: Uni Eropa, HAM, Belarus

### **Pendahuluan**

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Peran Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar.

Uni Eropa membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia termasuk para pemain baru di mana mereka memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing. Uni Eropa berupaya memastikan bahwa kemitraannya didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama, di mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni Eropa juga merupakan anggota dalam lembaga HAM PBB yaitu the Human Rights Council dan berupaya untuk memastikan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia akan mampu untuk memnuhi mandatnya secara bertanggung jawab dan efektif (Smith, 2011)

Uni Eropa berupaya memperkuat hubungan dengan beberapa negara, salah satunya yaitu Belarus. Belarus merupakan negara bekas Republik Soviet yang

merdeka pada tahun 1991. Pada tahun 1991-1994 Stanislav Shushkkevich menjadi ketua dewan tertinggi Belarus. Pada tahun 1994 negara ini berada di bawah kepemimpinan politik dari Presiden Alexander Lukashenko, presiden pertama negara itu sejak pembubaran Uni Soviet. Alexander Lukashenko telah memerintah negara itu dengan cara yang otoriter. Lukashenko telah membangun sistem terpusat kekuasaan, menghancurkan oposisi dan secara bertahap memperluas kekuasaannya. Kelompok oposisi utamanya adalah Blok Kemerdekaan Belarusia dan Angkatan Inggris Demokrat (Anastasiu, 2013). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa sistem politik Belarusia "tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia". The Economist Intelligence Unit mengukur peringkat Indeks Demokrasi terhadap 167 negara dan Belarus berada pada posisi ke 141 pada tahun 2012. Lukashenko telah disebut sebagai diktator terakhir Eropa dan negara ini secara konsisten telah dikritik karena catatan Hak Asasi Manusia yang buruk dan pelanggaran kebebasan sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan bergerak. Putaran pemilihan parlemen dan presiden juga dinilai telah gagal memenuhi standar internasional untuk pemilu yang bebas dan adil.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Uni Eropa dalam Menegakkan HAM**

. HAM adalah salah satu nilai inti bagi Uni Eropa. HAM secara universal merupakan norma hukum yang berlaku, dimana penghargaan terhadap HAM akan terpenuhi dengan penerapan norma yang ada, seperti norma kebebasan untuk terenuhinya hak berbicara, berkumpul maupun berpolitik. Penghargaan terhadap hak-hak juga berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Pemimpin yang memiliki moralitas yang rendah akan menciptakan pemerintahan yang otoriter, yang tidak memenuhi hak-hak asasi manusia karena sering membatasi hak dan kebebasan warga negaranya. Oleh karena itu, Uni Eropa memiliki tekad bersama untuk memajukan perdamaian dan stabilitas untuk membangun dunia yang

memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini mendukung semua aspek kebijakan internal dan eksternal dari Uni Eropa.

Uni Eropa berusaha untuk mempertahankan kebijakan luar negeri yang jelas berbasis prinsip dan normatif dalam penekanan pada demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa atau yang dikenal dengan *The Common Foreign and Security Policy* (CFSP) dari Uni Eropa didirikan oleh Perjanjian Uni Eropa atau *Treaty on European Union* (TEU) pada tahun 1993. Perjanjian Lisbon, perjanjian reformasi Uni Eropa yang mulai berlaku pada bulan Desember 2009, diperkenalkan perubahan yang dirancang untuk meningkatkan koherensi dan efektivitas kebijakan luar negeri Uni Eropa. Perjanjian itu sebagai awal untuk memperbaiki tiga kelemahan utama yang analisis telah diidentifikasi berkaitan dengan kebijakan eksternal Uni Eropa dan proses pembuatan kebijakan Uni Eropa. Pertama, sementara konsensus tidak ada pada banyak isu, mencapai kesepakatan politik antara negara-negara anggota dapat inheren sulit. Perbedaan antara negara-negara anggota dapat meninggalkan Uni Eropa dengan kebijakan tipis dikembangkan atau tanpa kebijakan umum sama sekali. Kurangnya konsensus dan arah dapat menghambat perkembangan pendekatan strategis jangka panjang untuk masalah atau wilayah. Kedua, kritik teratur menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Uni Eropa cenderung menderita cukup koordinasi kelembagaan dan koherensi. Terlalu sering, untaian antar pemerintah dan supranasional kebijakan eksternal tidak dikaitkan dengan cara yang berarti atau pelengkap. Ketiga, pengaturan yaitu kelembagaan sebelumnya, mantan menonjol dari berputar enam bulan presidensi nasional di luar urusan-rentan terhadap pergeseran prioritas, dengan hasil yang kadang-kadang merugikan kelangsungan kebijakan.

Perjanjian Uni Eropa menguraikan prinsip-prinsip yang memandu kebijakan dan tindakan eksternal Uni Eropa. Di bawah perjanjian itu, Uni Eropa bertujuan untuk (a) menjaga nilai-nilai kepentingan mendasar, keamanan, kemerdekaan, dan

integritas; (b) mengkonsolidasikan dan mendukung demokrasi, supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional; (c) menjaga perdamaian, mencegah konflik dan memperkuat keamanan internasional, sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, dengan prinsip-prinsip UU Helsinki Akhir dan dengan tujuan Piagam Paris, termasuk yang berkaitan dengan perbatasan eksternal ;(d) mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dari negara-negara berkembang, dengan tujuan utama untuk memberantas kemiskinan;(e) mendorong integrasi semua negara ke dalam ekonomi dunia, termasuk melalui penghapusan progresif pembatasan perdagangan internasional; (f) membantu mengembangkan langkah-langkah internasional untuk melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam global, dalam rangka untuk memastikan pembangunan berkelanjutan; (g) membantu populasi, negara dan wilayah menghadapi bencana alam atau buatan manusia; dan (h) mempromosikan sistem internasional berdasarkan pada kerjasama multilateral kuat dan pemerintahan global yang baik (Mix, 2013).

Uni Eropa juga memiliki instrument untuk Hak Asasi Manusia yaitu Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007, adalah ekspresi konkret dari komitmen Uni Eropa untuk mempromosikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Sekitar 90% dari mitra didukung oleh Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia adalah organisasi masyarakat sipil (OMS). Tujuan keseluruhan dari instrumen ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum, dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Berlakunya Traktat Lisbon pada bulan Desember 2009 memberikan beberapa perubahan radikal dalam pendekatan Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia (HAM). Pada bulan Mei 2001, Komisi mengadopsi komunikasi peran Uni Eropa dalam

mempromosikan HAM dan demokratisasi di negara-negara dunia ketiga, di mana Uni Eropa menyediakan pengembangan strategi koheren dan satu lagi berorientasi pada sejumlah prioritas untuk langkah-langkah menegakkan HAM. Pendekatan baru telah dikembangkan bekerjasama dengan beberapa Direktorat Jenderal. Negara-negara Anggota, Parlemen Eropa dan LSM juga terlibat dalam pelaksanaannya. Uni Eropa telah berperan aktif dalam menegakkan HAM di beberapa Negara, termasuk Myanmar dan Filipina.

### **Kondisi HAM di Belarus**

Belarus adalah negara otoriter. Konstitusi negara menyediakan bagi seorang presiden yang dipilih secara langsung, yang kepala negara, dan sebuah parlemen bikameral, majelis nasional. Sebuah perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden adalah kepala nominal pemerintah. Dalam prakteknya, kekuasaan terkonsentrasi pada presiden. Sejak pemilihannya sebagai presiden pada tahun 1994, Aleksandr Lukashenko telah mengkonsolidasikan kekuasaannya atas semua lembaga dan merusak aturan hukum melalui cara-cara otoriter, termasuk pemilu dimanipulasi dan keputusan sewenang-wenang. Pemerintah juga membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara dan pers, berkumpul, berserikat, agama, dan gerakan. Pemerintah menyita barang cetakan dari aktivis masyarakat sipil dan mencegah media independen dari menyebarkan informasi dan bahan. Pemerintah terus menghambat atau mencegah kegiatan dari beberapa kelompok agama, di kali denda mereka atau membatasi layanan mereka.

Masalah HAM yang paling signifikan terus menjadi ketidakmampuan warga untuk mengubah pemerintah mereka; sistem kehilangan *checks and balances* yang berwenang, pelanggaran serius; dan pemenjaraan ratusan orang yang bermotif politik pemerintah selama setahun. Pemerintah Belarus berlaku sewenang-wenang dengan melakukan penahanan hukuman aktivis oposisi dan pembela hak asasi manusia atas tuduhan palsu. Pembela Hak Asasi Manusia dan wartawan menghadapi penganiayaan dari pihak berwenang, penjara, penangkapan, interogasi, pemeriksaan pajak, dan kadang-kadang ditolak meninggalkan negara itu. Kurangnya pendaftaran hukum

dengan pihak berwenang dapat menyebabkan penjara, dan menerima uang dari luar negeri untuk bekerja HAM adalah ilegal, jika tidak melewati otoritas, dan dapat menyebabkan hukuman penjara.

Masalah HAM lainnya termasuk pelanggaran oleh pasukan keamanan, yang mengalahkan tahanan dan demonstran, menggunakan kekerasan yang berlebihan untuk membubarkan demonstran, dan dilaporkan menggunakan penyiksaan dan penganiayaan selama penyelidikan dan di penjara. Kondisi penjara sangat miskin. Pihak berwenang sewenang-wenang ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan warga untuk mengkritik pejabat, untuk berpartisipasi dalam demonstrasi, dan untuk alasan politik lainnya.

Belarus juga merupakan negara terakhir di Eropa yang menerapkan hukuman mati (Amnesty International). Pada 2013, pengadilan Belarusia menghukum tiga orang dengan hukuman mati. Pada bulan Oktober, Mahkamah Agung Belarus dibatalkan salah satu dari ini, mengenai kasus pembunuhan, dan memutuskan bahwa kasus ini akan kembali diselidiki. Mereka dihukum mati di Belarus yang menolak kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarga mereka, keluarga tidak diberitahu tentang tanggal pelaksanaan hukuman mati tersebut. Selain itu, tempat pemakaman juga tidak disampaikan kepada pihak keluarga (World Report, 2014)

### **Kebijakan Uni Eropa terhadap Pelanggaran HAM di Belarus**

Kebijakan Uni Eropa terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Belarus adalah memberikan tekanan politik dan ekonomi berupa pembatasan (embargo senjata, pembekuan aset & larangan perjalanan) yang dimulai pada tahun 2006 kepada Presiden Alexander Lukashenko dan pejabat Belarus yang dikatakan mendukung rezim Lukashenko dan terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belarus, yang kegiatannya sangat merusak demokrasi atau aturan hukum dengan pelanggaran standar pemilu internasional dalam pemilihan Presiden di Belarus dan tindakan keras pada masyarakat sipil dan oposisi demokratis (HM Treasury, 2012). Kebijakan ini bertujuan untuk mereformasi nilai dan norma

kebebasan serta meningkatkan nilai moralitas di negara Belarus. Kebijakan ini juga didukung oleh identitas Uni Eropa sebagai organisasi yang menjunjung tinggi penegakkan HAM.

### **Embargo Senjata**

Embargo persenjataan merupakan salah satu jenis sanksi yang dapat digunakan untuk memaksa negara-negara dan aktor-aktor non-pemerintah untuk meningkatkan perilaku mereka untuk kepentingan perdamaian dan keamanan internasional ([www.sipri.org](http://www.sipri.org)). Embargo ini umumnya dikenakan oleh PBB atau Uni Eropa pada 'senjata dan bahan terkait' (seperti amunisi militer, senjata dan barang). Sanksi dan embargo adalah alat perdagangan politik, terutama diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE). Tujuan utama dari semua sanksi dan embargo PBB, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, adalah untuk melaksanakan keputusan oleh Dewan Keamanan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan Uni Eropa juga dapat dikenakan untuk menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum.

Belarus juga merupakan negara pengeksport senjata terkuat, sehingga sanksi dapat mempengaruhi ekspor senjata oleh Belarus. Uni Eropa melarang keterlibatan entitas yang berbasis di Uni Eropa dalam membuat dana yang tersedia atau sumber daya ekonomi untuk Beltechexport, perusahaan terbesar ekspor/impor produk militer di Belarus. Negara-negara Uni Eropa yang pernah mengimpor senjata dari Belarus yaitu Hongaria, Republik Ceko dan Swedia. Pada tahun 1995 Hongaria mengimpor bom udara FAB-500 dari Belarus, tahun 1996 Republik Ceko mengimpor 100 B-72 tank tempur utama, dan ditahun yang sama Swedia mengimpor hingga 5.000 teleskop (Vasilevich, 2002).

Langkah-langkah spesifik yang diadopsi oleh Uni Eropa dalam sanksi yang dikenakan pada Belarus pada Juni 2011 terdiri dari larangan penjualan, pasokan, transfer atau ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari ' semua jenis senjata dan bahan terkait'; larangan penjualan, pasokan, transfer atau ekspor, baik

secara langsung maupun tidak langsung, dari daftar peralatan yang dapat digunakan untuk represi internal ditetapkan dalam Peraturan Dewan (UE) 588/2011; Larangan ketentuan, langsung atau tidak langsung, dari bantuan teknis, pembiayaan atau bantuan keuangan atau layanan yang berkaitan dengan item yang tercantum baik pada Daftar Militer Inggris atau dalam Peraturan Dewan. Ada pengecualian terbatas dalam larangan ini misalnya, untuk barang-barang yang dimaksudkan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan atau penggunaan pelindung oleh personel Uni Eropa atau PBB.

### **Pembekuan Aset dan Larangan Perjalanan**

Pembekuan aset dan larangan perjalanan adalah sejumlah sanksi yang sering juga disebut sanksi pintar yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk memerangi terorisme internasional. Pembekuan aset dan larangan perjalanan disebut sanksi pintar karena mereka hanya menargetkan individu atau organisasi tertentu, dengan efek minimal bagi masyarakat. Secara umum, Uni Eropa memberlakukan tindakan pembatasan untuk membawa perubahan dalam kebijakan atau kegiatan dari negara yang menjadi target, bagian dari suatu negara, pemerintah, entitas atau individu. Mereka adalah pencegahan, non-hukuman, instrumen yang seharusnya memungkinkan Uni Eropa untuk menanggapi dengan cepat tantangan dan perkembangan politik. Sanksi harus digunakan sebagai bagian dari pendekatan kebijakan terpadu dan komprehensif, dalam rangka strategi kebijakan luar negeri keseluruhan Uni Eropa, yang melibatkan dialog politik, upaya saling melengkapi dan instrumen lainnya.

Uni Eropa pertama melakukan tindakan pembatasan Presiden Lukashenko dan beberapa pejabat Belarusia pada bulan Mei 2006, dengan Peraturan 765/2006. Sanksi itu diperpanjang pada tahun 2012 dan 2013, dan terdiri dari embargo senjata, embargo peralatan untuk represi internal dan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap individu dan entitas dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang kegiatannya serius merusak demokrasi atau aturan hukum

di Belarus, atau yang mendapatkan manfaat dari atau mendukung rezim Lukashenko (Lester, 2014).

Dewan memutuskan untuk membekukan rekening bank dan aset keuangan lainnya dari Presiden Belarus Aleksander Lukashenko dan 35 pejabat senior Belarus dan keluarga mereka. Keputusan untuk membekukan rekening bank pejabat Belarusia merupakan proses yang lebih sulit dari larangan visa. Rancangan resolusi bertujuan untuk membekukan rekening Presiden Lukashenko, Menteri Dalam Negeri Vladimir Naumov, Jaksa Agung Pyotr Miklashevich, Ketua KGB Stepan Sukhorenko, Ketua DPRD Lower Chamber Vladimir Konoplev dan pejabat lain. Kabar tentang resolusi dikeluarkan beberapa hari sebelum pengesahannya karena otoritas Uni Eropa takut apabila pejabat Belarusia mungkin menarik keluar uang mereka dan mentransfernya ke bank di Swiss, Polandia atau negara lain (Dovnar, 2006).

Perusahaan Belarus yang bergerak dibidang perminyakan dan bahan kimia, seperti Belneftekhim, dengan kantor perwakilannya di Jerman dan Latvia, telah ditambahkan ke daftar entitas yang dikenakan sanksi. Sanksi difokuskan pada larangan perdagangan di Belneftekhim yang menghasilkan sebagian besar pendapatan untuk Lukashenko (Rettman, 2011). Sanksi juga ditargetkan pada individu yang diyakini menyalurkan uang ke nomenklatura dari produk minyak bumi perusahaan Belneftekhim dan Triple, Beltechexport dan perusahaan pupuk Belaruskalii. Salah satu sanksi ditujukan kepada Yuri Sivakov, seorang pria yang diduga melakukan pencucian uang untuk Presiden Alexander Lukashenko. Dilaporkan bahwa pada tahun 2006 Sivakov pergi ke sebuah perusahaan bernama Chyest. Seorang mantan duta besar AS untuk Minsk juga melaporkan bahwa Chyest digunakan untuk mencuci uang hingga \$ 1,5 juta untuk kader Lukashenko melalui bank di Polandia (Rettman & Tymots, 2011).

Krisis energi 2007 antara Rusia dan Belarus berkontribusi menurunkan ketegangan antara Uni Eropa dan Belarus. Lukashenko menanggapi masalah dengan

Moskow dengan mencari celah dengan Uni Eropa. Pada bulan Juni 2010, Komisi mengundang Belarus untuk memulai negosiasi untuk fasilitasi visa dan perjanjian pendaftaran kembali untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun, sejauh ini, belum ada jawaban resmi oleh otoritas Belarusia. Sementara itu, negara-negara anggota Uni Eropa yang menggunakan fleksibilitas yang ada ditawarkan oleh Kode Visa untuk membebaskan dan mengurangi biaya visa. Namun, penggunaan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi damai memprotes pemilihan presiden yang dicurangi pada Desember 2010 membuat Dewan Uni Eropa melanjutkan larangan perjalanan dan memperpanjang daftar sanksi pada bulan Januari 2011 (Giumelli & Ivan, 2013). Dengan tidak adanya perbaikan di dalam negeri, Dewan kembali ke memaksakan larangan perjalanan, pembatasan keuangan, dan embargo senjata di Belarus.

Atas pelanggaran standar pemilu di bulan Desember 2010 pemilihan presiden di Belarus, sanksi dilanjutkan pada Januari 2011. Mereka bertanggung jawab atas pelanggaran standar internasional pemilu dalam pemilihan presiden dalam pelanggaran HAM tahun 2006 atau 2010 dan represi masyarakat sipil dan oposisi demokratik, atau pengusaha terkait dan mendukung rezim Lukashenko. Sebanyak 243 orang dikenai larangan masuk ke Uni Eropa dan sebanyak 32 badan usaha juga telah terdaftar. Mereka yang dikenakan sanksi adalah oposisi demokratik, atau pengusaha terkait yang mendukung rezim Lukashenko dan bertanggung jawab atas pelanggaran standar internasional pemilu dalam pemilihan presiden dan pelanggaran HAM tahun 2006 atau 2010.

Pada 10 Oktober 2011, Uni Eropa telah memperluas sanksi terhadap rezim Presiden Belarusia Alexander Lukashenko otoriter karena penindasan yang terus menerus terhadap oposisi. Uni Eropa memperpanjang larangan visa dan pembekuan aset terhadap 192 individu terkait dengan rezim dan menambahkan 16 lebih entitas (KyivPost, 2011). Uni Eropa juga telah melarang anggotanya mengirim senjata atau perlengkapan anti huru hara untuk bangsa Eropa Timur.

Pada 16 Desember 2011, Uni Eropa memperkuat tindakan pembatasan. Dewan memperkuat tindakan pembatasan Uni Eropa kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas penindasan terus menerus terhadap masyarakat sipil, oposisi politik dan media independen di Belarus. Dewan menambahkan dua orang yang terlibat dalam persidangan pembela HAM Ales Byalyatski ke daftar orang-orang dikenakan pembekuan aset dan larangan memasuki Uni Eropa. Pada saat yang sama, aset tiga entitas terkait dengan rezim tetap dibekukan sementara untuk ekspor senjata ke Belarus dan bahan yang dapat digunakan untuk represi internal juga dilarang.

Pada 28 Februari 2012 Dewan menambahkan 21 orang yang bertanggung jawab untuk represi masyarakat sipil dan oposisi demokratik di Belarus ke daftar orang-orang yang ditargetkan oleh larangan perjalanan dan pembekuan aset (ECR Group, 2012). Sepanjang 2011 dan 2012 diberbagai kesempatan Uni Eropa memiliki di banyak kesempatan dan di forum-forum yang berbeda menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di Belarus. Uni Eropa telah berulang kali khususnya menyerukan untuk pembebasan segera dan tanpa syarat dan rehabilitasi semua tahanan politik (European Commission, 2012).

Kekhawatiran Uni Eropa akan kondisi di Belarus dijabarkan dalam kesimpulan Dewan 31 Januari 2011, 20 Juni 2011 dan 23 Maret 2012, serta dalam berbagai pernyataan Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan/Wakil Presiden Komisi Catherine Ashton di Belarus. Prioritas pertama adalah pembebasan segera dan tanpa syarat dan rehabilitasi dari dua belas orang yang dianggap tahanan politik. Semua pelecehan dari anggota oposisi, dan masyarakat sipil harus berhenti dan kebijakan represif harus digulung kembali. Tindakan pembatasan dari Uni Eropa merupakan instrumen penting untuk menjaga tekanan politik Belarus. Uni Eropa telah berulang kali menekankan bahwa tindakan tetap terbuka dan selalu dikaji.

Pada 23 Maret 2012, Dewan memperkuat tindakan pembatasan terhadap rezim Belarusia. Terhadap latar belakang kerusakan lebih lanjut dari situasi di

Belarus, Dewan terus memperkuat tindakan pembatasan terhadap mereka yang bertanggung jawab untuk represi masyarakat sipil di negara itu. Dewan menambahkan 12 orang ke daftar orang-orang yang ditargetkan oleh larangan perjalanan dan pembekuan aset. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dan mendukung rezim serta orang yang bertanggung jawab untuk represi masyarakat sipil dan oposisi demokratik di Belarus. Selain itu, Dewan membekukan aset 29 entitas, yang dikendalikan oleh orang yang dikenakan tindakan pembatasan karena peran mereka dalam mendukung rezim.

Pada 29 Oktober 2013, sanksi Uni Eropa terhadap Belarus diperpanjang. Menyusul tinjauan tahunan, Dewan telah memutuskan bahwa mereka tindakan pembatasan harus diperpanjang sampai 31 Oktober 2014. Sanksi baru-baru ini diperpanjang hingga 31 Oktober 2014 dan daftar termasuk 232 individu dan 25 entitas (Giumelli & Ivan, 2013). Hal ini karena tidak semua tahanan politik telah dibebaskan, tidak ada tahanan dirilis telah direhabilitasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi juga belum membaik. Tinjauan tahunan memperbarui daftar yang ditargetkan dalam larangan perjalanan dan pembekuan aset oleh Uni Eropa. Uni Eropa mempertahankan kebijakannya dalam keterlibatan dengan Belarus, dimaksudkan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di negara itu.

### **Implikasi Kebijakan Uni Eropa terhadap Belarus**

Kebijakan Uni Eropa terhadap pelanggaran HAM yang terjadi Belarus belum menunjukkan perubahan yang signifikan hingga tahun 2014. Hal ini membuat Dewan Uni Eropa memperpanjang langkah-langkahnya untuk satu tahun lagi, sampai 31 Oktober 2015 (Lester, 2014). Pada 22 Agustus 2015 Belarus akhirnya memutuskan untuk membebaskan enam tahanan politik. Mereka yang dibebaskan termasuk Mikola Statkevich yang mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu tahun 2010. Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas tuduhan menyelenggarakan demonstrasi di jalan-jalan untuk menentang pemilu yang dikecam pihak oposisi dan Barat telah

dicurangi (Elshinta.com, 2015). Pembebasan semua tahanan politik ini merupakan langkah yang telah lama dicari oleh Uni Eropa. Dalam menanggapi perubahan positif ini, Dewan mengambil langkah-langkah untuk menanggukkan sanksi selama empat bulan, sampai 29 Februari 2016 yang ditujukan untuk 170 orang dan tiga entitas. Sanksi terus di perpanjang hingga 28 Februari 2017. Empat orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Belarus tetap dikenakan tindakan pembatasan, yaitu Vladimir Naumov (Mantan Menteri Dalam Negeri dan mantan Kepala Security Service Presiden), Dmitri Pavlichenko (Mantan Kepala Grup Response khusus di Kementerian Dalam Negeri), Viktor Sheiman (Kepala Departemen Pengelolaan Presiden Administrasi dan mantan Sekretaris Dewan Keamanan), dan Iury Sivakov (Mantan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Olahraga, dan mantan Wakil Kepala Administrasi Presiden) (Lester, 2016). Embargo senjata juga terus berlaku. Melalui tindakan pembatasan dari Uni Eropa yang telah menunjukkan kemajuan ini, mendorong perkembangan positif lebih lanjut yang akan mengarah pada peningkatan hubungan Uni Eropa dan Belarus. Uni Eropa akan terus memonitor situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Belarus (The European Council, 2015).

### **Kesimpulan**

Uni Eropa didirikan pada keterlibatan yang kuat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum di seluruh dunia. Perdamaian yang berkelanjutan, pembangunan dan kesejahteraan tidak bisa ada tanpa menghormati hak asasi manusia. Uni Eropa akan terus berupaya untuk mempromosikan tujuan-tujuan dalam menegakkan HAM melalui tindakan-tindakan eksternalnya. Uni Eropa berusaha untuk mencegah pelanggaran HAM dimanapun pelanggaran itu terjadi, termasuk di Belarus. Pelanggaran HAM di Belarus telah terjadi sejak terpilihnya Alexander Lukashenko sebagai presiden Belarus tahun 1994. Alexander Lukashenko memimpin Belarus secara otoriter. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain: Tidak adanya kebebasan berbicara dan pers, penangkapan aktivis HAM, kondisi penjara miskin, tidak adanya kebebasan

beragama, tidak adanya kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran dalam hak-hak politik serta masih diterapkannya hukuman mati di Belarus. Berbagai kecurangan terjadi dalam pemilihan presiden seperti ada tahun 2006 dan 2010 sehingga mengakibatkan pemilihan presiden di Belarus dinilai tidak memenuhi standar internasional untuk pemilihan yang bebas dan adil. Dalam menanggapi pelanggaran HAM di Belarus tersebut, Uni Eropa telah memberikan tekanan politik berupa pembatasan (embargo senjata, pembekuan aset & larangan perjalanan) yang dimulai pada tahun 2006 kepada Presiden Alexander Lukashenko dan pejabat Belarus yang dikatakan mendukung rezim Lukashenko dan terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belarus.

## **Referensi**

- Amnesty International. (n.d.). Retrieved from <http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/europe/belarus>
- Anastasiu, A. (2013, October 6). Retrieved from <http://one-europe.info/belarus-dealing-with-europes-last-dictatorship>
- Dovnar, V. (2006, May 16). Retrieved from [http://www.kommersant.com/p673382/r\\_1/EU\\_Freezes\\_Lukashenko\\_s\\_Money/](http://www.kommersant.com/p673382/r_1/EU_Freezes_Lukashenko_s_Money/)
- ECR Group. (2012, February 28). Retrieved from <http://ecrgroup.eu/news/welcome-for-stronger-measures-regarding-belarus/>
- Elshinta.com. (2015, August 23). Retrieved from <http://elshinta.com/news/23399/2015/08/23/belarus-bebaskan-enam-tahanan-politik>
- European Commission. (2012, May 15). Retrieved from [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-12-332\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-332_en.htm)
- Giumelli, f., & Ivan, P. (2013). The Effectiveness of EU Sanctions An analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma).

- HM Treasury. (2012, November 2). Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-belarus>
- KyivPost. (2011, October 11). Retrieved from <https://www.kyivpost.com/content/russia-and-former-soviet-union/european-union-set-to-extend-belarus-sanctions-114446.html?flavour=mobile>
- Lester, M. (2014, October 30). Retrieved from <http://europeansanctions.com/2014/10/30/eu-renews-belarus-sanctions/>
- Lester, M. (2016, February 29). Retrieved from <https://europeansanctions.com/category/belarus/>
- Mix, D. E. (2013). *The European Union: Foreign and Security Policy*. *Congressional Research Service* .
- Rettman, A. (2011, February 2). Retrieved from <https://euobserver.com/foreign/31734>
- Rettman, A., & Tymots, I. (2011, March 10). Retrieved from <https://euobserver.com/foreign/31734>
- Smith, K. E. (2011). *The European Union and the Review of The Human Rights Council*. United Kingdom.
- The European Council. (2015, October 29). Retrieved from <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/29-belarus>
- Vasilevich, A. (2002). Belarus on Arms Market in 2003. *Ekspert Volruzheniy Journal* .
- World Report. (2014). Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/belarus>
- www.sipri.org. (n.d.). Retrieved from <http://www.sipri.org/databases/embargoes>